

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
TUJUAN																			
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim						33.998.756.511			5.216.817.683	15,34								
		1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,71	74,27		74,71	100			V							
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	77,23	85,01		77,23	91			V							
SASARAN																			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	1	Penurunan Emisi GRK (IUP)	TonCO2eq	709905,71	1129065,77		713957,59	63,23						V				
	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	2	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	71,11	72,47		71,12	98,14			V							
	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik						18.025.496.259			4.687.816.271	26,01								
		3	Nilai IKM Perangkat Daerah		85,67	79,00		85,67	100			V					Adanya layanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRKPLH antara lain layanan persampahan, penyedotan lumpur tinja, pelayanan penghunian Rusunawa dll, kemudian dilaksanakan survei secara mandiri terkait kualitas pelayanan	Keterbatasan sarana dan prasana dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasana pengangkutan sehingga berdampak pada kualitas dalam pelayanan. Kualitas bangunan rusunawa yang membutuhkan perawatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
		4	Nilai AKIP Perangkat Daerah		74,9	75,00		75	100			V					Kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen dari pimpinan terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Belum optimalnya tingkat pemahaman seluruh ASN dalam pelaksanaan dan komitmen terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan pemahaman seluruh ASN dalam pelaksanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
PROGRAM																			
	Program Pengembangan Perumahan						409.999.252			55.234.033	13,47								
	Meningkatnya Hunian Layak	1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100		100	100			V					Keenam Rusunawa masih terhuni dan termanfaatkan, serta operasional Rusunawa, baik layanan listrik maupun air masih dapat terlaksana dan dikelola	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Rusunawa	Mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan Rusunawa dengan alokasi anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerusakan ringan

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi I					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
												ST	T	S	R	SR			
		2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100		100	100			V					Tidak ada korban bencana yang mengakibatkan relokasi		Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa
		3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100		100	100			V					Tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan relokasi rumah	warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah	
	Program Kawasan Permukiman						3.144.600.000			6.162.149	0,20								
	Meningkatnya Kawasan Permukiman	4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,7	96,43		96,7	100			V					Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
		5	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,8	48,81		48,8	100			V					Kondisi kekumuhan di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori Kumuh sedang dan ringan, penanganan kumuh dari anggaran pusat dan provinsi untuk lokasi kawasan kumuh sesuai kewenangannya	Keterbatasan anggaran APBD dalam pembangunan infrastruktur kumuh, pendanaan provinsi dan pusat terbatas pada lokasi prioritas yang lebih membutuhkan penanganan	Mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran
		6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	68,38	69,06		68,38	99,02			V					Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
		7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	78,79	80,03		78,79	98,45			V					Kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni oleh pemda, swasta/ CSR	Rumah tangga baru menikah belum memiliki rumah pribadi (masih menumpang orang tua) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni	Mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umu dan subsidi Mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak hunimelalui berbagai sumber anggaran
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						0			0	0								

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi						Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
												ST	T	S	R	SR				
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	8	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100		100	100			V					Adanya koordinasi lintas sektor	Ketidakhahaman masyarakat	sosialisasi	
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum						0			0	0									
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	9	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100		100	100			V					Adanya koordinasi lintas sektor		Sosialisasi dan mediasi sejak awal program	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						2.634.961.000			0	0									
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		0,8	13,06		0,85	6,51							V	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT	Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 menurun dipengaruhi adanya perubahan metode perhitungan sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi	
		11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)		100	100		100	100			V					Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT	Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik Akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum muncul kebutuhan/kesadaran penyedotan pada masyarakat	Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						0			0	0									
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	12	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,65	17,3		17,65	100			V					Pembangunan TPS 3R pada tahun 2025 sebanyak 5 unit		Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan pembangunan TPS3R	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						22.500.000			280.092	1,24									
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	13	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100		0	0							V	Tersusunnya Dokumen SLHD Kabupaten Temanggung Tahun 2026	Masih ada beberapa data yang belum terupdate dan belum lengkap	Masih di tahap proses analisis penetapan isu prioritas sebagai bahan pembahasan analisis DPSIR	
																			Koordinasi dan mengadakan rapat dengan tim teknis penyusunan Dokumen SLHD yang terdiri dari OPD teknis terkait	

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
												ST	T	S	R	SR			
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	81,7	80		81,7	100			V						1. Masih kurangnya sarpras perlengkapan pemeliharaan taman dan pemeliharaan pohon ayoman 2. Berkurangnya SDM Pertamanan dikarenakan pensiun dan tidak ada pengganti, sehingga ada lokasi-lokasi yang terjangkau dalam pemeliharaan	Memberlakukan sistem Tim Kerja dalam pelaksanaan tugas
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						5.000.000			1.130.000	22,60								
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	21	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100		20,00	20,00							V	Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.
		22	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100		100	100			V					Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.
		23	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100		100	100			V					Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi I						Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
												ST	T	S	R	SR				
	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						15.000.000			645.000	4,30									
	Meningkatnya Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	24	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,8	30,93		30,8	100			V					1. Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan 2. Tahun 2025 Sekolah Adiwiyata Kabupaten bertambah sebanyak 14 Sekolah	Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata	1. 12 Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 masih dalam proses pembinaan, penilaian akan dilaksanakan di bulan Mei. 2. Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 3. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						5.000.000			270.028	5,40									
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100		0	0							V	Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan sampai dengan triwulan I tahun 2026: 1. Penghargaan Kalpataru 2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung	1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun 2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun	1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional 2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup 3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan 5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						5.000.000			475.000	9,50									

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Kinerja 2026	Anggaran	Realisasi Kinerja 2026	Capaian Kinerja 2026 (%)	Realisasi Anggaran 2026	Capaian Anggaran 2026 (%)	a Penilaian Realisasi						Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
												ST	T	S	R	SR				
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100		100	100			V					Adanya sikap kooperatif dan pemantauan bersama dampak lingkungan hidup baik dari pemrakarsa usaha, masyarakat dan OPD terkait Penyelesaian aduan masyarakat secara musyawarah antara pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melalui fasilitasi Pemerintah Desa	Masih kurangnya kesadaran atau empati masyarakat atau pemrakarsa usaha adan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dampaknya mengganggu masyarakat sekitar. Adanya aduan masyarakat yang berasal dari dampak kegiatan usaha kecil atau konflik sosial di masyarakat sehingga penanganannya tidak dapat menggunakan instrumen peraturan lingkungan hidup dan penanganannya melalui pendekatan sosial.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup.	
	Program Pengelolaan Persampahan						3.554.200.000			437.454.410	12,31									
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	27	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah	%	33,84	34,14		32,02	93,79			V					Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya	Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah	
		28	Persentase sampah yang terkelola	%	63,28	64,07		62,80	98,02			V					Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya	Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah	
		29	Cakupan Pelayanan persampahan	%	76,47	77,85		76,47	98,23			V					Terdapat penambahan jumlah desa yang melakukan pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA		Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah	
							33.998.756.511			5.216.817.683	15,34									
JUMLAH INDIKATOR TUJUAN				2					95,42			2	0	0	0	0				
JUMLAH INDIKATOR SASARAN				4					90,31			3	0	0	1	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				29					79,60			22	1	0	0	6				
JUMLAH INDIKATOR DPRKPLH				35					88,44			27	1	0	1	6				

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%